

Paradigma Kesetaraan Gender di Masyarakat Pedesaan Terhadap Kontribusi Perempuan dalam Budidaya Pertanian

Paradigm of Gender Equality in Rural Communities on the Contribution of Women in Agricultural Cultivation

Akhyar Rafi'i*¹, Esy Rehmalemta Br Pelawi^{2,3}

^{1,2}Universitas Gadjah Mada; Bulaksumur, Caturtunggal, Fax (0274) 6491936

³Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, Sekolah Pascasarjana UGM

e-mail: *¹ akhyarrafii@mail.ugm.ac.id

ABSTRAK

Pertanian masih menjadi sektor unggulan dalam pembangunan di Indonesia. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2021 sektor pertanian masih menempati peringkat kedua dengan kontribusi tertinggi terhadap PDB Indonesia yaitu mencapai 13,22%, dalam hal ini termasuk kehutanan dan perikanan. Pertumbuhan positif sebesar 1,77% secara luas, dan pertanian sempit akan mengalami peningkatan sebesar 2,13%. Budidaya pertanian yang cukup erat dengan masyarakat pedesaan memiliki hubungan yang dengan budaya disana, salah satunya budaya patriarki. Ketidaksetaraan membawa ketimpangan bagi perempuan dalam Budidaya pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana paradigma kesetaraan gender di masyarakat pedesaan terhadap kontribusi perempuan dalam Budidaya pertanian. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan paradigma yang dibawa adalah paradigma positivistik sehingga tetap melanggengkan ketimpangan gender. Adapun hal-hal yang menyebabkan ini yaitu pola hidup, pengalaman, budaya, stigma dan stereotip di masyarakat. Untuk menyelesaikan ini diperlukannya revolusi pemikiran untuk membawa paradigma baru yang lebih relevan. Ketercapaian kesetaraan akan meningkatkan pembangunan sektor pertanian.

Kata kunci—*Kesetaraan Gender, Masyarakat Pedesaan, Paradigma, Budidaya Pertanian*

ABSTRACT

Agriculture is still the leading sector in development in Indonesia. In the period 2018 to 2021 the agricultural sector is still in second place with the highest contribution to Indonesia's GDP, reaching 13.22%, in this case including forestry and fisheries. A positive growth of 1.77% broadly, and narrow farming will experience an increase of 2.13%. Agricultural cultivation which is quite close to rural communities has a strong relationship with the culture there, one of which is patriarchal culture. Inequality brings inequality for women in agricultural cultivation. This study aims to analyze how the paradigm of gender equality in rural communities affects the contribution of women in agricultural cultivation. The research was conducted qualitatively with a phenomenological approach. Based on the results of the research, it shows that the paradigm that is carried is a positivistic paradigm so that it continues to perpetuate

gender inequality. The things that cause this are lifestyle, experience, culture, stigma and stereotypes in society. To solve this, a revolution of thought is needed to bring a new paradigm that is more relevant. Achieving equality will increase the development of the agricultural sector.

Keywords—*Gender Equality, Rural Society, Paradigm, Agricultural Cultivation*

PENDAHULUAN

Dewasa ini pembangunan terus dilaksanakan dengan masif di berbagai sektor kehidupan. Hal ini tentunya diharapkan dapat membawa banyak perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Program-program pembangunan yang berkelanjutan terus dilaksanakan guna mendukung peningkatan taraf hidup tersebut, baik melalui peningkatan kapasitas SDM, permodalan, maupun sinergitas kebijakan.

Pertanian sebagai salah satu sektor dalam pembangunan masih menjadi komponen yang berkontribusi banyak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, apalagi seperti di Indonesia yang masih didominasi oleh wilayah produktif untuk budidaya pertanian. Hal ini bisa dilihat dari kontribusi sektor pertanian dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDP) Indonesia dalam kurun waktu dari tahun 2018 hingga 2021 masih menduduki posisi kedua dengan persentase 13,22% (Mas'ud & Wahyuningsih, 2022).

Data tersebut memang bersifat umum dimana sektor pertanian secara luas meliputi kehutanan dan perikanan. Bahkan saat pandemi melanda pun dari pertengahan tahun 2020 hingga akhir 2021 sektor pertanian masih mengalami pertumbuhan positif sebesar 1,77% pada pertanian luas, dan pertanian sempit masih mengalami peningkatan sebanyak 2,13%.

Berdasarkan data tersebut pertanian masih menjadi sektor yang membawa banyak perubahan dan

peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat baik secara langsung maupun tidak. Sektor pertanian yang juga sangat kompleks mulai dari subsektor budidaya hingga pascapanen membuat pengembangan di sektor pertanian memberikan potensi yang luar biasa.

Kalimantan Selatan merupakan provinsi Lumbung Padi Nasional, bahkan menjadi penyumbang pemenuhan pangan di pulau Kalimantan. Berdasarkan data terakhir yang dirilis BPS, Luas panen Padi di Kalimantan Selatan mencapai 356.245 Ha, sedangkan untuk total produksi mencapai 1.342.861 Ton GKG. Berdasarkan data ini sektor pertanian di Kalimantan Selatan memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan ekonomi, selain itu sektor tanaman pangan non padi serta komoditas hortikultura juga memiliki potensi yang cukup baik (BPS, 2022).

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten lumbung pangan dan strategis pengembangan sektor pertanian. Jagung menjadi komoditas tanaman pangan unggulan dengan luas panen terbanyak mencapai 20.013 Ha (BPS, 2022).

Berkaitan dengan sektor pertanian tentunya tidak terlepas dengan wilayah pedesaan, hal ini karena sektor pertanian masih didominasi wilayah pedesaan. Masyarakat pedesaan yang begitu humanis cenderung memiliki nilai sosial yang tinggi terhadap budaya gotong royong. Akan tetapi, masyarakat pedesaan juga sangat dengan budaya patriarki, sehingga menyebabkan banyak

ketimpangan yang merugikan salah satu pihak subjek entitas dalam pembangunan, dalam hal ini adalah perempuan (Kemenpppa, 1995).

Budaya Patriarki adalah sistem yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang peran utama yang sentral dibandingkan gender lainnya. Dalam sistem budaya ini juga menempatkan perempuan sebagai kelas kedua yang diposisikan sebagai subordinat dengan banyak batasan normatif sehingga dalam beberapa keadaan perempuan sangat banyak dirugikan (Susanto, 2016).

Budaya patriarki ini juga yang terus melanggengkan ketimpangan, subordinasi, hingga hibridasi peran perempuan dengan banyak kerugian di dalamnya. Hingga tahun 2022 Indonesia masih memiliki indeks ketimpangan gender yang tinggi yaitu mencapai 0,390, kemudian provinsi Kalimantan Selatan menduduki indeks 0,438, sedangkan Kabupaten Tanah laut dengan Indeks 0,378 (BPS, 2022).

Data-data tersebut menunjukkan ketimpangan yang cukup signifikan jika lebih dari 0,3. Masyarakat pedesaan dengan indeks ketimpangan yang tinggi akan membuat perempuan sebagai entitas semakin mengalami dominasi, subordinasi dan peran ganda, ditambah mayoritas ada di sektor pertanian.

Perlu untuk dilakukan pengkajian bagaimana paradigma masyarakat pedesaan dalam kesetaraan gender dalam sektor pertanian. Selain menganalisis bagaimana paradigma masyarakat, penelitian ini juga akan melihat bagaimana fenomena kesetaraan gender disana dan apa saja hal-hal yang melatarbelakangi ketimpangan terus berlanjut (Probosiwi, 2015).

Adapun pertanyaan dari penelitian ini yaitu Bagaimana Paradigma Kesetaraan gender di masyarakat pedesaan terhadap kontribusi perempuan dalam budidaya

Pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana paradigma, faktor-faktor, dan penyelesaian berkaitan dengan kesetaraan gender di masyarakat pedesaan dalam sektor pertanian.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2022 hingga bulan Maret 2023. Untuk lokasi penelitian dipilih secara *purposive* dengan pertimbangan lokasi yang menjadi sentral program pembangunan pertanian yaitu di Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan (Ahyar et al., 2020).

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hal ini dipilih untuk melihat dan menganalisis bagaimana fenomena kesetaraan gender yang akan membentuk paradigma masyarakat pedesaan (Murdiyanto, 2020).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu, Observasi, wawancara mendalam dan studi pustaka. Untuk jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan sekunder. Pemilihan informan menggunakan *snowball sampling* yaitu penyuluh pertanian sebagai informan kunci, petani sebagai informan utama, serta *stakeholders* sebagai informan pendukung (Siyoto, 2015).

Teknik analisis data yang dilakukan melalui pengambilan data, reduksi data, dan interpretasi data dengan pertimbangan keabsahan data dari hasil triangulasi teknik, waktu, dan sumber. Sehingga dapat menghasilkan data dan interpretasi yang keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan (Dr. Ismael Nurdin, Dra. Sri Hartati, 2019)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadaan Umum

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu kabupaten sentral pertanian yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai wilayah dengan dominasi sektor pertanian luas ini sehingga Kabupaten Tanah Laut menjadi wilayah strategis program pembangunan pertanian.

Kecamatan Kurau merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut yang juga didominasi oleh potensi pertanian luas seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Kecamatan Kurau Berada 114,583-114,711 Bujur Timur 3,56309-3,72364 Lintang Selatan (BPS, 2022).

Kecamatan Kurau juga berbatasan secara langsung dengan wilayah lainnya yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bumi Makmur, di sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bati-bati dan Kecamatan Tambang Ulang, untuk di sebelah Barat berbatasan dengan Laut Jawa, serta di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Takisung.

Luas keseluruhan kecamatan Kurau yaitu 127,00 Km yang terdiri dari 11 Desa. Adapun luasan setiap desa yang ada di Kecamatan Kurau dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Luas Desa dan Persentase Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut

No	Nama Desa	Luas Desa (Km)	Persentase di Kecamatan (%)
1	Sungai Bakau	15,00	11,81
2	Raden	15,00	11,81
3	Maluka Baulin	9,00	7,09
4	Bawah Layung	15,00	11,81

5	Tambak Karya	10,00	7,87
6	Padang Luas	16,00	12,60
7	Tambak Sarinah	4,50	3,54
8	Sarikan di	4,50	3,54
9	Handil Negara	9,00	7,09
10	Kali Besar	15,00	11,81
11	Kurau	14,00	11,02
Kurau		127,00	100,00

Sumber. Data Sekunder Kecamatan Kurau

Karakteristik Informan

Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Kurau mayoritas berasal dari suku masyarakat lokal sana yaitu suku Banjar Melayu, adapun suku lainnya karena adanya perkawinan campur multi etnis sehingga melahirkan suku campuran dengan suku Jawa, Sunda, maupun Madura. Jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Kurau yaitu sebanyak 13.580 Jiwa yang terdiri dari 6.883 jiwa Laki-laki dan 6.697 Perempuan.

Tabel 1. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	10	50
2	Perempuan	10	50
		20	100

Sumber. Data Primer Penelitian

Pengambilan informan dengan jumlah yang sama antara laki-laki dan perempuan diharapkan memberikan keterwakilan gender yang setara. Secara keseluruhan informan dari penelitian ini tidak memiliki latar belakang pendidikan berbasis gender, atau istilah gender belum sesuatu yang masih tabu bagi para responden.

Karakteristik Sosial Masyarakat

Masyarakat yang ada di Kecamatan Kurau ini termasuk dalam masyarakat dengan rasa sosial yang tinggi, khususnya di sektor pertanian. Hal ini dibuktikan dengan cukup mudah untuk menemukan kegiatan pertanian yang dilakukan berganti saling membantu, dalam istilah masyarakat disana disebut "*bearian*". Kegiatan ini dilakukan dengan bekerja secara bergantian dari satu lahan sawah petani, ke petani lainnya hingga semuanya mendapatkan giliran.

Keadaan sosial disana juga cukup banyak dipengaruhi oleh beberapa budaya yang berasal dari suku melayu banjar, seperti budaya adanya "*pepuluran*" merupakan sajian hidangan makan berat maupun ringan untuk menjamu para pekerja di sektor pertanian.

Budidaya Pertanian di Wilayah Pedesaan

Kecamatan Kurau merupakan salah satu kecamatan tumpuan pangan di Kabupaten Tanah Laut tentu saja memiliki potensi bidang pertanian luas yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan maupun peternakan. Komoditas unggulan perkebunan di Kecamatan Kurau adalah Kelapa Sawit sebanyak 110,25 ton serta tanaman Karet mencapai 119,4 ton. Secara umum ada 2 jenis lahan sawah yang ada di Kecamatan Kurau yaitu lahan pasang surut dengan luas 7.557 Ha serta lahan lebak mencapai 700 Ha. Sedangkan lahan non sawah terdiri dari tegalan dengan luas 450 Ha. Komoditas unggulan bidang tanaman pangan di Kecamatan Kurau yaitu Padi Sawah dengan luas panen 7.716 Ha, sedangkan Jagung sebesar 156 Ha, dan Ubi Kayu 18 Ha. Untuk Potensi unggulan tanaman hortikultura yaitu Cabai dengan total produksi mencapai 10.367 Kwintal atau mencapai 10 Ton (BPS, 2022).

Tanaman Padi Sawah sebagai komoditas unggulan sektor pertanian tanaman pangan mayoritas membudidayakan varietas lokal maupun varietas unggul. Memandang potensi tanah yang cukup subur sehingga varietas unggul baru pun dapat memberikan produktivitas yang cukup baik. Namun, jika membandingkan nilai ekonomi antara gabah padi lokal, dengan gabah padi unggul memiliki perbedaan harga yang cukup signifikan. Hal ini karena padi unggul belum menjadi konsumsi utama masyarakat disana dengan alasan ketidakcocokan cita rasa karakteristik dari nasi yang dihasilkan. Sehingga padi lokal memiliki harga jual yang lebih tinggi

Berdasarkan hal tersebut, sektor pertanian di kecamatan Kurau merupakan pemasukan utama masyarakat disana meskipun pada beberapa wilayah yang berdekatan dengan sungai muara pemasukan juga berasal dari sektor perikanan tangkap. Seperti masyarakat di desa Bawah Layung dan Handil negara yang didominasi menjadi nelayan sebagai profesi utama. Kecenderungan melakukan budidaya pertanian didominasi dengan potensi pertanian warisan keluarga.

Perempuan dan Pertanian di Pedesaan

Wilayah pedesaan cenderung sangat berkaitan dengan praktik di sektor pertanian. Hal ini tentunya wilayah pedesaan yang masih didominasi oleh hamparan tanah yang begitu luas serta kondisi tanah yang subur sehingga sangat memungkinkan untuk pengembangan sektor pertanian. Kecamatan Kurau yang terdiri dari 13 Desa ini hampir keseluruhan didominasi usaha dibidang pertanian luas. Pertanian luas disini meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan hingga perikanan tangkap.

Namun, berdasarkan keadaan topografi yang sedikit berbeda antara satu desa dengan desa lainnya sehingga menyebabkan pola rotasi komoditas hingga komoditas unggulan yang ada di desa juga tidak selalu sama.

Seperti Desa Bawah Layung dan Desa Raden yang cukup berdekatan dengan wilayah perairan sungai muara dan bibir pantai cenderung mata pencaharian utama adalah menjadi nelayan. Sehingga untuk komoditas utama masih didominasi tanaman padi, tetapi tidak sebagai mata pencaharian utama masyarakat di desa tersebut. Berbeda dengan desa lainnya, selain kedua desa tersebut semuanya merupakan pedesaan dengan komoditas unggulan tanaman padi dan perkebunan karet. Desa Maluka Baulin salah satu desa yang cukup banyak ditemukan komoditas perkebunan karet ini.

Perempuan dan pedesaan sebuah hubungan yang begitu kompleks di tengah budaya patriarki yang begitu kuat. Bukan berarti budaya patriarki tidak ditemukan di wilayah perkotaan, namun individualisme yang lebih tinggi di wilayah perkotaan cenderung membentuk stigma patriarki yang lebih lemah. Berbeda dengan masyarakat yang berada di pedesaan, keadaan masyarakat yang kolektifis dan humas, adanya intervensi kepercayaan, adat dan budaya yang menjadi kebiasaan menyebabkan patriarki semakin kuat dan berkelanjutan. Budaya patriarki yang banyak menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan ini tentu saja kebanyakan tidak disadari bahwa memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pembangunan (Amalia et al., 2022).

Perempuan di pedesaan dengan kualifikasi yang rendah akan menjadi buruh tani dalam kegiatan pertanian, namun perempuan lainnya yang juga berasal dari keluarga petani pemilik tidak akan terlepas peranannya dalam

sektor pertanian, baik kegiatan budidaya pertanian, pemasaran hingga manajemen usaha tani. Adapun peranan perempuan dalam kegiatan budidaya mulai dari persiapan lahan, penanaman, perawatan, hingga panen. (Yuwono, 2013). Meskipun pada tahapan olah tanah perempuan tidak sepenuhnya memegang peran, tetapi masih banyak yang membutuhkan tenaga perempuan sebagai sanitasi lahan pra tanam. Durasi waktu bekerja perempuan dalam kegiatan budidaya ini juga sama dengan para pria, akan tetapi pada beberapa kasus seringkali perempuan mendapatkan upah yang lebih rendah yang disebabkan oleh bias gender (Hujatulu, 2015).

Meskipun perempuan berpartisipasi penuh dalam kegiatan budidaya pertanian dan manajemen usaha tani, tanggung jawab rumah tangga yang dibebankan kepada para perempuan tidak berkurang. Hal ini tentu saja dikarenakan kebiasaan dan budaya yang melanggengkan pemikiran yang patriarkis. Sehingga konsep kesetaraan gender baik dalam rumah tangga maupun pembagian kerja belum dilaksanakan bahkan masih menjadi sesuatu yang tabu. Berdasarkan keadaan ini sehingga peran ganda yang harus diambil perempuan penyebab ketidakberdayaan dengan banyak tuntutan keadaan.

“Biasa sebelum pergi ke sawah semua pekerjaan rumah sudah harus saya selesaikan baik beberes, menyiapkan sarapan, hingga mengantarkan anak sekolah. Setelah tanggung jawab rumah tangga selesai baru saya akan pergi ke sawah. Begitupun dengan istirahat siang, saya akan menyiapkan segala kebutuhan makan siang, jika ada waktu luang saya memanfaatkan untuk beberes pekerjaan sebelumnya yang belum rampung. Cukup padat dan sedikit berat, tetapi mau bagaimana lagi

inikan sudah menjadi tanggung jawab saya baik sebagai istri maupun sebagai seorang Ibu” (MAL, Pr, 38 Tahun, 25/08/2022).

Saking terbiasanya para perempuan disana menerima ketimpangan dan ketidakadilan berbasis gender sehingga segala hal dirasa sudah menjadi tanggung jawab suatu gender tertentu. Tanggung jawab bekerja di sektor pertanian saja sudah cukup berat, kemudian dengan adanya peran ganda ini menyebabkan perempuan semakin mengalami instrumentalisasi, subordinasi, dan juga perampasan hak-hak subjek untuk mendapatkan kesetaraan.

“Sejauh ini untuk pekerjaan rumah semuanya dilakukan istri saya, ya menurut saya itu memang tanggung jawab dia dalam berumah tangga. Kalau masalah membantu dalam kegiatan budidaya saya tidak pernah memaksakan, namun dengan kondisi yang seperti sekarang ini tidak memungkinkan untuk semuanya saya lakukan sendiri, dan tidak ada biaya jika pekerjaan dilakukan oleh buruh tani. Saya rasa sejauh ini pasangan saya baik-baik saja untuk melakukan keduanya, baik melakukan aktivitasnya sebagai Ibu rumah tangga, ataupun membantu saya diladang” (MS, Lk, 45 Tahun 22/09/2022).

Kontribusi perempuan dalam sektor pertanian seringkali tidak tervalidasi, sehingga seolah-olah kedudukannya adalah sebagai sebuah peran pendukung. Hal ini juga yang menyebabkan indikasi adanya perbedaan upah pekerja perempuan dalam sektor pertanian di pedesaan. Kesenjangan yang disebabkan oleh ketidaksetaraan gender ini seringkali juga tidak disadari oleh pihak perempuan karena terlalu seringnya menerima diskriminasi, bias gender, subordinasi serta adanya relasi kuasa para laki-laki

dalam ranah lokal maupun domestic (Susanto, 2016).

Paradigma Kesetaraan Gender di Masyarakat Pedesaan

Kesetaraan gender merupakan keadaan yang menunjukkan kesamaan kesempatan, akses dan peluang antara satu gender dengan gender lainnya. Sebagai sebuah subjek dalam pembangunan tentu saja perempuan dan laki-laki sudah seharusnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam pembangunan secara luas. Akan tetapi, ketidaksetaraan masih sering terjadi khususnya di wilayah pedesaan yang sangat erat budaya patriarki. (Rahma & Amanah, 2020). Kesetaraan gender yang sedang banyak diupayakan oleh komunitas akar rumput tidak hanya terkait pekerjaan domestik dan lokal, akan tetapi bagaimana seharusnya perempuan bisa berpartisipasi dalam segala sektor maupun sub sektor pembangunan, bukan hanya sekedar sebagai keterwakilan, tetapi sebagai subjek yang juga memberikan kontribusi yang sama dengan para laki-laki (Chotim, 2020).

Bagi beberapa lapisan masyarakat, kesetaraan gender merupakan sesuatu yang sangat baru bahkan dianggap sebuah paham yang salah dan tabu dalam lingkungan sosial, khususnya di wilayah pedesaan. Beberapa kelompok tertentu meyakini bahwa gerakan kesetaraan gender ini merupakan gerakan yang mempersilahkan perempuan menjadi pemberontak, padahal yang sesungguhnya adalah perempuan hanya menuntut haknya yang dirampas sebagai subjek pembangunan yang membatasinya untuk mencapai keberdayaan diri yang berkelanjutan (Wibowo et al., 2022).

Untuk keluar dari keadaan tersebut cukup sulit dan begitu kompleks, selain keterbatasan

perempuan dalam mendapatkan kesadaran atas ketimpangan dan ketidaksetaraan, adanya relasi kuasa dan dominasi dari para lelaki semakin menekan ketidakberdayaan perempuan (Sardi, 2018).

Ketidakberdayaan yang dimaksud adalah untuk sadar dan keluar dari lingkungan yang patriarki. Secara keberdayaan diri untuk bertahan hidup tentu kemampuan perempuan tidak diragukan, peran ganda yang mengikutinya memberikan ketangguhan dalam menjalankan banyak peran disaat bersamaan.

Akan tetapi, untuk sebuah kemajuan dalam pembangunan khususnya pada sektor pertanian, peran perempuan seharusnya tidak terbatas pada kelompok tertentu, sehingga kompetensi perempuan dalam keberdayaan diri dapat diimplementasikan dalam ranah yang lebih luas, tetapi peran gandanya pada sektor domestik harus mendapatkan kesetaraan terlebih dahulu.

Paradigma merupakan sebuah keyakinan maupun kepercayaan yang menjadi dasar seseorang dalam melakukan segala tindakan. Perilaku individu yang sering kita lihat dan temukan dalam kehidupan sehari-hari merupakan sebuah outcome dari paradigma yang dipilih untuk dijadikan sebuah keyakinan dari individu tersebut (Nugraha et al., 2016).

Selain itu, sebagai sebuah epistemologi berpikir, paradigma juga mempengaruhi manusia dalam hal berpikir dan bersikap, sehingga paradigma ini dapat berubah atau bergeser nilainya tergantung peningkatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang di diseminasi oleh individu tersebut. Dalam memandang suatu realitas tertentu, dibutuhkan sebuah paradigma yang

dianut sebagai sebuah landasan berpikir dan juga *standing position* yang sesuai.

Meninjau permasalahan kesetaraan gender, juga harus dilakukan menggunakan paradigma yang mampu memandang realitas bahwa ketidaksetaraan itu memang ada, tidak hanya pada ranah personal, lokal, maupun domestik akan tetapi dalam skala yang lebih luas kesetaraan masih terlihat, khususnya bagaimana ketidaksetaraan gender terhadap kontribusi perempuan dalam sektor pertanian (Aldanto & Dkk., 2015).

Masyarakat pedesaan dalam memandang kesetaraan gender belum menggunakan paradigma kritis, sehingga sebagian besar tidak dapat melihat realitas besar yang menunjukkan sebuah ketidaksetaraan yang ada.

Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi masyarakat pedesaan yang ada di Kecamatan Kurau ini sehingga masih berada pada beberapa pemikiran dengan paradigma yang positivistik dan konstruktivistik dalam memandang kesetaraan gender sebagai sebuah isu atas ketimpangan yang ada bagi para perempuan sebagai subjek pembangunan.

Intervensi dari sebuah agama, adanya relasi kuasa, hingga budaya yang sudah turun temurun terhadap subordinasi yang berkelanjutan ini menyebabkan semuanya terasa biasa, perempuan dan laki-laki di sana sudah menerima segala doksa dan heterodoksa yang tidak antitesis terhadap kebiasaan yang melanggengkan ketidaksetaraan (Fauziah et al., 2015).

Dominasi paradigma positivistik dalam penelitian ini menggambarkan sebuah generalisasi yang meluas namun tidak faktual. Secara garis besar, dirasa tidak ada permasalahan ketidaksetaraan gender dalam sektor pertanian. Para perempuan sebagai subjek pembangunan yang sering mendapatkan

bias gender dan subordinasi belum dapat mengidentifikasi melalui internalisasi personal atas ketidakadilan yang individu tersebut dapatkan. Hal ini dibuktikan dengan validasi peranan kontribusi perempuan dalam sektor pertanian sebagai sebuah dukungan sekunder dan tersier, sistem pengupahan yang bias gender, hingga peran ganda yang didapatkan dalam sektor keluarga, lokal, maupun domestik.

“Sejauh apa yang saya lihat dan pahami ibu-ibu merasa senang saja dapat membantu pekerjaan di Sawah tanpa melupakan tanggung jawabnya di rumah. Tentu saja karena ini sudah biasa dilakukan orangtua kita terdahulu. Perempuan dan para Ibu diperbolehkan membantu asal tugasnya untuk memasak, mencuci dan pekerjaan rumah lainnya tidak terbengkalai, saya rasa hampir semua orang di wilayah ini setuju akan hal itu” (SM, L, 45, 28/10/2022).

Paradigma positivistik dalam memandang kesetaraan gender terhadap kontribusi perempuan di sektor pertanian ini memberikan banyak bias dan ketidakadilan bagi para perempuan. Memandang semuanya secara umum dan menyamaratakan serta beranggapan bahwa tidak ada masalah dalam realitas faktual membuat akan permasalahan terhadap ketidaksetaraan ini tidak pernah ditemukan dan diselesaikan dengan konkrit.

“Kebanyakan rekan-rekan saya sesama perempuan di sektor pertanian merasa mau bagaimanapun juga, kita sebisa mungkin meringankan beban kepala keluarga dalam pengelolaan lahan dan budidaya meskipun sering keteteran dalam pekerjaan rumah, mau bagaimana lagi karena itu sudah tanggung jawab saya baik sebagai seorang Ibu maupun seorang istri. Lagian dalam kepercayaan saya juga

nurut sama suami itu sebagai sebuah kewajiban” (MR, P, 39, 30/10/2022).

Kebiasaan dan pola hidup yang bertumbuh menjadi budaya dan diyakini sebagai sebuah nilai-nilai yang sakral cenderung pemaknaanya tidak selalu sesuai, begitu juga terkait paradigma kesetaraan gender ini yang kebanyakan akan berbenturan dengan beberapa unsur budaya yang menggunakan perspektif patriarkis didalamnya. Saking terbiasanya berada dalam belunggu kekuasaan, subordinasi dan bias gender, para perempuan di sana sampai tidak bisa untuk membangun kesadaran internal, mengidentifikasi ketidaktepatan kedudukan mereka, hingga ketimpangan yang selalu ada. Menyambut transformasi kehidupan sosial yang baru, membutuhkan adanya revolusi pemikiran atas hibridasi keilmuan yang ramah dan berwawasan kesetaraan. Kedudukan perempuan yang sebenarnya memegang banyak peranan penting di sektor pertanian harus dikelola dengan baik dan difasilitasi untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai subjek pembangunan (Afni et al., 2022).

Faktor Penyebab Ketimpangan dan Ketidaksetaraan

Ketimpangan dan ketidaksetaraan gender yang terjadi terhadap kontribusi perempuan dalam sektor pertanian memiliki latar belakang keadaan yang kompleks, serta didukung oleh beberapa faktor penyebab sehingga kesenjangan ini terus terjadi. Pola Hidup sebagai sebuah kebiasaan dalam aktivitas sehari-hari seseorang dalam menjalankan kehidupannya membentuk sebuah keadaan berulang yang terus menerus, sehingga dalam jangka panjang membentuk sebuah kebiasaan dan budaya baru (Arbain et al., 2017).

Namun, individu dan lingkungan sosial yang terbiasa dengan pola hidup lama tanpa adanya transformasi sosial

akan cenderung terus secara tekstual mendesiminasikan kebiasaan yang dibawa oleh generasi sebelumnya. Pola kehidupan yang ada di pedesaan begitu erat dengan suatu norma sosial yang berlaku, sehingga apabila ada hal-hal yang baru cukup sulit untuk membuat sebuah rekonstruksi yang linier. Seperti nilai kesetaraan gender yang dibawa dalam perubahan sosial, masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu, bahkan beberapa kalangan menganggap sebagai sebuah paham yang mempersilahkan para perempuan menjadi pemberontak. Reformasi terhadap pola hidup yang berasaskan kesetaraan gender ini harus diimplementasikan sebagai sebuah percontohan, meskipun dalam praktiknya dianggap menyimpang, tapi itulah bagian proses pembangunan manusia.

“Saya setiap pagi sudah ke sawah dan semuanya kebutuhan sudah disiapkan istri. Saya sudah lelah bekerja sebagai kepala keluarga sehingga tanggung jawab dirumah yang semuanya dipegang istri. Mau bagaimanapun itu tanggungjawab dia. Kalau dia menuntut kesetaraan sini biar dia yang kerja saya yang dirumah, dikira jadi tulang punggung enak, kerja di sawah lagi. Lagian dari awal adanya laki-laki dan perempuan kan memang dibuat dengan kemampuan yang tidak sama” (BG, L, 39, 12/11/2022).

Selain pola hidup, pengalaman sebagai bentuk faktor personal pembentukan paradigma dan persepsi juga memiliki kedudukan yang krusial dalam menciptakan dan melanggengkan ketimpangan gender. Pengalaman masa lalu yang berasaskan cerita atau kebiasaan nenek moyang yang seharusnya direvitalisasi karena adanya dekonstruksi pemikiran membuat individu tetap memegang teguh nilai yang sudah tidak aplikatif. Pengalaman yang diterima ketika bias gender,

subordinasi, dan ketidaksetaraan dianggap sebagai hal yang biasa dimasa lalu membuat kelompok individu tertentu terperangkap dalam hidup tanpa transformasi dan perubahan sosial yang progres (Kartini & Maulana, 2019).

“Saya sudah ikut bekerja di sawah sejak berusia 13 tahun, ya kalau masalah tanggung jawab dirumah juga saya yang melakukan karena mama saya sibuk bekerja dan adik-adik saya banyak dengan jarak tahun yang dekat. Saya tidak protes dengan beban yang saya lakukan, karena mama selalu bilang dulu dia juga seperti itu. Sehingga, saya berpikir mama saja bisa kenapa saya tidak” (SAM,P, 48, 12/10/22).

Selain pola hidup dan pengalaman, suatu budaya dalam masyarakat tertentu juga menjadi komponen yang memiliki peranan krusial terhadap kelangsungan ketimpangan gender ini. Secara umum, baik budaya yang diartikan secara tekstual maupun budaya yang dipahami secara kontekstual. Secara spesifik budaya patriarki yang membentuk ketidaksetaraan ini adalah budaya yang mendudukan laki-laki sebagai subjek, sedangkan perempuan sebagai objek, sehingga dominasi dan kekuasaan terbentuk hingga menyebabkan diskriminasi terhadap suatu gender tertentu.

Budaya yang muncul selain karena keturunan dari generasi sebelumnya, beberapa budaya juga diintervensi bahkan di instrumentalisasi oleh kepercayaan tertentu untuk menguntungkan satu pihak dalam subjek pembangunan. Rekonstruksi sebuah budaya merupakan strategi yang baik namun begitu sulit dan kompleks ditengah intervensi banyak kepercayaan dan intrumentalisasi budaya (Nelly, 2021).

Selain beberapa faktor penyebab diatas, masih ada faktor penyebab lainnya yaitu stigma dan stereotip. Stereotip sebagai sebuah penilaian umum terhadap seseorang karena penampilan atau latarbelakangnya menjadikan individu sering melakukan skeptis yang tidak rasional. Salah satu bentuk yang ditemukan adalah perempuan yang banyak bekerja mendapatkan stereotip bahwa mereka malas atau tidak suka untuk melakukan pekerjaan dirumah, padahal belum tentu begitu adanya (Sardi, 2018).

Selain itu, tanggung jawab pekerjaan rumah bukan hanya dari pihak perempuan saja. Sedangkan stigma adalah pandangan umum yang mengarah pada nilai negatif dalam memandang suatu hal, seperti perempuan yang bekerja pasti tidak bertanggung jawab atas perannya di rumah. Stigma dan stereotip ini menjadi *basic clause* yang seringkali membuat ketimpangan dan ketidaksetaraan ini berkelanjutan (Gutama & Widiyanseno, 2020).

“Saya sebagai perempuan yang ikut bekerja di sawah jika saat tanam dan panen saja dianggap kurang ahli, sehingga cukup sulit mendapatkan pekerjaan sebagai buruh tani, padahal bekerja sebagai buruh tani di musim paceklik untuk tenaga perawatan salah satu pemasukan yang baik. Padahal beberapa laki-laki pun kayaknya sama aja dengan saya tetapi tidak diperlakukan sama” (NS, P.39, 28/22/2022).

Sebuah Paradigma Baru Untuk Revolusi Pemikiran

Paradigma sebagai sebuah landasan dalam melihat realitas dan menganalisa keadaan cenderung tidak selalu sesuai karena adanya sebuah transformasi perubahan sosial. Secara aksiologis kebaruan dan variasi paradigma dalam seorang individu atau kelompok berpikir sangat dibutuhkan,

hal ini agar tidak mudah menyalahkan, tidak mudah menyimpulkan, sehingga keberagaman sudut pandang bertujuan untuk memahami lebih jauh. Berkaitan dengan kesetaraan gender, paradigma positivistik tidak terlalu cocok dalam menghadapi realitas ini, sehingga untuk membentuk sebuah skeptis yang rasional perlunya transformasi paradigma baru untuk revolusi pemikiran. Paradigma baru yang dibawa sebaiknya tidak terlalu berseberangan langsung dengan paradigma yang sudah dimiliki oleh masyarakat yang ada dalam penelitian ini. Paradigma kritis menjadi salah satu pilihan yang cukup baik untuk revolusi pemikiran, melalui paradigma kritis ini akan melihat lebih jelas dan intens terhadap ketimpangan yang ada dalam kesetaraan gender (Wibowo et al., 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma yang ditemukan dalam penelitian adalah paradigma positivistik sehingga terus melanggengkan kesenjangan gender. Hal yang menyebabkan hal tersebut adalah gaya hidup, pengalaman, budaya, stigma dan stereotip yang ada di masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan revolusi pemikiran untuk menghadirkan paradigma baru yang lebih relevan. Tercapainya kesetaraan gender dalam kontribusi perempuan di sektor pertanian akan meningkatkan pembangunan sektor pertanian, hal ini karena semua subjek pembangunan pertanian berpartisipasi secara menyeluruh.

SARAN

Saran dari penelitian ini adalah dapat menggali lebih spesifik terhadap penyebab ketidaksetaraan yang begitu kompleks. Hal ini karena fokus

penelitian ini tidak kesana sehingga akan lebih baik penelitian lanjutan mengurai dan menganalisis dengan kompleks hal-hal umum maupun spesifik penyebab masih adanya ketidaksetaraan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, N., Rezal, M., & Latoki, L. (2022). Konsep Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Musawa: Journal for Gender Studies*, 14(1), 19–48. <https://doi.org/10.24239/msw.v14i1.980>
- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Aldanto, R., & Dkk. (2015). Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa. *Equilibrium Pendidikan Sosiologi*, 3(1), 1–10. <https://media.neliti.com/media/publications/69271-ID-kesetaraan-gender-masyarakat-transmigras.pdf>
- Amalia, B. R., Yuliaty, Y., & Kholifah, S. (2022). Perubahan Peran Perempuan pada Sektor Pertanian di Desa Tandawang. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.23887/jish.v11i1.36899>
- Arbain, J., Azizah, N., & Sari, I. N. (2017). PEMIKIRAN GENDER MENURUT PARA AHLI: Telaah atas Pemikiran Amina Wadud Muhsin, Asghar Ali Engineer, dan Mansour Fakih. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 11(1), 75. <https://doi.org/10.21580/sa.v11i1.1447>
- BPS, K. T. L. (2022). *Kecamatan Kurau Dalam Angka Tahun 2021*.
- Chotim, E. E. (2020). Kesetaraan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Di Indonesia: Keinginan Dan Keniscayaan Pendekatan Pragmatis (Studi Terhadap Ukm Cirebon Home Made). *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(1), 70–82. <https://doi.org/10.54783/jin.v2i1.357>
- Dr. Ismael Nurdin, Dra. Sri Hartati, M. S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*.
- Fauziah, R., Mulyana, N., & Raharjo, S. T. (2015). Pengetahuan Masyarakat Desa Tentang Kesetaraan Gender. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 259–268. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.13536>
- Gutama, P. P. B., & Widiyahseno, B. (2020). Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Desa. *Reformasi*, 10(1), 70–80. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i1.1834>
- Hujatulu, J. (2015). Analisis Peran Perempuan dalam Pertanian di Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kuburaya. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 4(April), 5–24.
- Kartini, A., & Maulana, A. (2019). Redefedensi Gender dan Seks. *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 12(2), 217–239.
- Kemenpppa. (1995). Pembangunan Manusia Berbasis Gender Pendahuluan. *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak*, xviii + 178.
- Mas'ud, & Wahyuningsih, S. (2022). *ANALISIS PDB SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2022 Pusat*

- Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian 2022.*
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Bandung: Rosda Karya*.
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIIF.docx
- Nelly, S. (2021). Gender Equality and Social Inclusion (GESI) in Village Development. *Legal Brief*, 10(2), 245–252.
www.legal.isha.or.id/index.php/legal
- Nugraha, A., Hestiawan, M. S., & Supyandi, D. (2016). Paradigma Kedaulatan Pangan di Indonesia : Studi Kasus Gerakan Pangan Lokal di Flores Timur. *Agricore : Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian*, 1(2).
- Probosiwi, R. (2015). Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Natapraja*, 3(1), 41–72.
- Rahma, A., & Amanah, S. (2020). Tingkat Kesetaraan Gender dalam Rumah Tangga Peserta Program Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(2), 207–216.
<https://doi.org/10.29244/jskpm.4.2.207-216>
- Sardi, I. (2018). Relasi Kuasa Dan Modal: Studi Perlawanan Masyarakat Desa Nangka Terhadap Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit Pt. Gemilang Cahaya Mentari. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 6(2).
<https://doi.org/10.20961/jas.v6i2.18082>
- Siyoto, S. dan A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Susanto, N. H. (2016). Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki. *Muwazah*, 7(2).
<https://doi.org/10.28918/muwazah.v7i2.517>
- Wibowo, G. A., Chairuddin, Rahman, & Riyadi. (2022). Kesetaraan Gender: Sebuah Tinjau Teori Feminisme. *Suparyanto Dan Rosad (2015)*, 9(2), 121–127.
<https://ejournalunsam.id/index.php/jsnbl/article/view/6360>
- Yuwono, D. M. (2013). Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pertanian : kasus pada pelaksanaan program. *Sepa*, 10(1), 140–147.
<https://jurnal.uns.ac.id/sepa/article/view/14122>